



BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Kelahiran PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kelahiran negara Republik Indonesia yang diproklamlirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara hukum Bank Negara Indonesia merupakan sebuah bank milik negara dengan nama Bank Negara Indonesia 1945.

Sehari setelah pelantikan Ir. Soekarno dan Moh Hatta sebagai Presiden dan wakil Presiden oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945, dibentuk Kabinet Presidentil dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS), sebagai ketua DPAS yang pertama tersebut telah ditunjuk R.M. Margono Djojohadikoesomo.

Selaku ketua, R.M. Margono Djojohadikoesoemo mempunyai gagasan untuk mendirikan Bank Sentral (Bank Sirkulasi) sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945. Kemudian disusunlah "Soerat Koeasa" yang ditandatangani oleh Presiden dan Wakil Presiden atas nama Pemerintah Indonesia yang diberikan kepada R.M. Margono Djojohadikoesoemo pribadi, untuk membuat dan mengerjakan persiapan pembentukan suatu Bank sentral (Bank Sirkulasi) Negara Indonesia pada tanggal 16 September 1945. Kemudian pada tanggal 19 September 1945 sidang dewan Menteri Republik Indonesia memutuskan untuk mendirikan sebuah bank milik negara yang berfungsi sebagai bank sirkulasi. Untuk itu

pemerintah memberikan surat kuasa kepada R.M. Margono Djojohadikoesoemo untuk mempersiapkan pembentukannya.

Sebagai langkah pertama, pada tanggal 8 Oktober 1945 dengan Akta Notaris R.M. Soeroso No.14 didirikan yayasan dengan nama "Poesat Bank Indonesia" terletak di jalan Menteng Raya No.23 Jakarta. Sebagai pimpinan adalah R.M. Margono Djojohadikoesoemo dan Mr.A.Karim sebagai Direktur Sekertaris, serta dibantu oleh TRB. Sabaroedin, Mr.Soekasno, R. Raharjo dan Martiono yang pada saat itu merupakan tenaga-tenaga berpengalaman di bidang perbankan.

Tujuan didirikan yayasan tersebut adalah berusaha dalam bidang ekonomi untuk kemakmuran dan kecerdasan bangsa melalui pemberian kredit dengan bunga rendah dan menjadi pusat penyimpanan uang dari masyarakat.

Dengan berpindahya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta, maka kantor yayasan di Jakarta dijadikan sebagai kantor cabang. Sedangkan di Yogyakarta, yayasan terus mengupayakan lahirnya bank BNI. Pada tanggal 5 Juli 1946 keluarlah ketetapan Perpu No.2 Tahun 1946 yang disebut sebagai Undang-Undang Bank BNI Tahun 1946 (pasal 23) peresmian tersebut dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1946.

Banyak hambatan-hambatan yang dihadapi Bank BNI sebagai Bank Sentral yang maencetak dan mengedarkan uang Republik Indonesia untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia, walaupun hal tersebut dapat berjalan dengan baik, yaitu dengan dibukanya kantor-kantor cabang, tetapi masa sulit

sangat dirasakan lebih-lebih dengan menghadapi Agresilitas Belanda, akhirnya meletus dalam perang dunia I dan II.

Terbentuknya negara RIS pada tahun 1945 dan kemudian negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1950, mengharuskan Bank BNI menata kembali organisasi, pembinaan dan pengembangan usahanya. Sejak bulan September 1950 Bank BNI ditetapkan sebagai bank devisa dan telah membuka kantor-kantor cabang di daerah basis ekspor antara lain Pekan Baru, Padang, Semarang, Surabaya, Ujung Pandang, Banjarmasin, dan Palembang.

Setelah *De Javasche Bank* dinasionalisasikan, pemerintah Republik Indonesia mendirikan Bank Indonesia sebagai bank sentral atau bank sirkulasi (UU No.11 Tahun 1953). Selanjutnya perjalanan sejarah Bank BNI dan aktivitasnya ditandai dengan beberapa kepeloporan dan pembinaan antara lain aktif dalam pengembangan efek, yaitu dengan dibukanya bursa efek pertama kali di Indonesia pada tanggal 3 Juni 1952.

Kemudian pada tanggal 1 Januari 1955 sebagai bank umum atau bank komersial, tugas utama adalah untuk memajukan kemakmuran rakyat dan pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam perdagangan ekspor-impor. Kantor cabang luar negeri pertama kali dibuka di Singapore (November 1955).

Gedung kantor besar Bank BNI yang terletak di jalan Lada Jakarta Kota, diresmikan pada tanggal 5 Juli 1956 yang diresmikan oleh Presiden Soekarno dan pemasangan tiang pertama oleh Presiden Direktur Bank BNI Mr. A. Karim, pada waktu itu gedung PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk di jalan Lada tersebut merupakan gedung bank yang terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara.

Pada bulan Desember 1959 dibuka Kantor Perwalian di Tokyo yang menjadi Kantor Cabang tahun 1960. Bank BNI mempopulerkan gerakan tabungan dimulai tanggal 26 Agustus 1960 yang sekarang dikenal dengan Tabanas dan Taska.

Pada tahun 1955 dikeluarkan Penetapan Presiden No.8 dan No.13 serta No.17 tentang Pengintegrasian Bank-bank Pemerintah. Dengan SK. Menteri Urusan Bank Sentral No.675/UBS/65 tertanggal 30 Juli 1965, terhitung tanggal 17 Agustus 1965, Bank BNI menjalankan usahanya dengan nama Bank BNI unit III.

Dengan keluarnya UU No.14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan (yang saat ini telah diganti). Ketentuan tentang Bank Sentral diatur dengan UU No.13/68, sedangkan Bank-bank Pemerintah lainnya dikembalikan kepada status dan fungsinya semula. Berdasarkan UU No.17 tahun 1968 nama Bank BNI unit III dalam hubungan ini diganti menjadi Bank BNI yang usahanya ditujukan kepada ekonomi rakyat, usaha Bank Umum dengan memprioritaskan sektor industri. Memasuki tahun 1969 dengan dimulainya pelaksanaan Pelita hingga saat ini Bank BNI sangat berperan aktif dalam pengembangan nasional.

Pemasangan tiang baja pertama pembangunan gedung BNI 1946 di jalan Sudirman dilakukan pada awal tahun 1987. Sedangkan gedung di jalan Lada masih tetap digunakan untuk Kantor Wilayah dan Yayasan. Gedung Bank BNI tersebut berbentuk segi delapan dengan tinggi 132,5m dan berlantai 32 (2 basement).

Sejak tanggal 8 Juli 1988, telah diresmikan pemakaian logo BNI 1946 yaitu "Bahtera Layar" dan nama "Bank BNI". Unsur sumber daya manusia tetap merupakan prioritas di BNI'46.

Tahun 1992 dengan keluarnya UU Perbankan No.7 tahun 1992, fungsi Bank-bank Pemerintah lebih diarahkan menjadi Bank Umum Swasta sehingga badan hukumnya berbentuk Persero. Demikian pula halnya dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yang dengan keluarnya Peraturan Pemerintah RI No.19 tahun 1992 tanggal 29 April 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Negara Indonesia yang menjadi perusahaan Persero. Sesuai Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 02.8290.HT.01.04 Tahun 1996, memberikan persetujuan atas perusahaan status Perseroan Tutupan menjadi Perseroan Terbuka. Maka Bank BNI menjadi Perusahaan Perseroan (Perseroan) PT. Bank Negara Indonesia, disingkat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Yang sesuai dengan akte perubahan anggaran dasar perseroan tanggal 2 Agustus 1996, dibuat oleh Notaris Adam Kasdjar Musdi, SH. Dan kemudian pada tanggal 28 Oktober 1996, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk juga telah memasuki tahap "*Go Public*".

Dengan demikian semua aktivitas PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menjadi mandiri, walaupun pemerintah melalui Bank Indonesia sebagai Bank Sentral hanya terbatas pada hal pengawasan saja kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan mengingat pada prinsip kehati-hatian.

2.2 Stuktur Organisasi Perusahaan

Organisasi adalah sekelompok manusia yang dipersatukan dalam suatu kerjasama yang efisien untuk mencapai tujuan dan melaksanakan wewenang dan tanggung jawab dalam merencanakan suatu organisasi. Pada dasarnya perencanaan terdiri dari pembagian tugas yang logis, penetapan garis wewenang yang jelas. Penilaian pelaksanaan yang sedemikian rupa dapat dibuat struktur organisasi yang baik.

Demikian pula yang telah dilakukan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dan untuk meningkatkan efektifitas, maka PT. Bank Negara Indonesia melaksanakan organisasi secara menyeluruh.

Dalam melaksanakan kegiatan perusahaan, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk mempunyai struktur organisasi yang mengalami penyempurnaan-penyempurnaan, akibat adanya pengaruh atau masukan-masukan dari perusahaan ekstern maupun intern perusahaan. Berdasarkan surat Keputusan Direksi No. KP/123/DIR/R tanggal 21 Maret 2000, telah ditetapkan pembagian bidang direksi. Struktur organisasi PT. Bank Negara Indonesia dipimpin oleh beberapa komite permanen. Direktur Utama dan Direksi langsung membawahi 19 Divisi/Unit/Satuan yang dikelompokkan kedalam 7 segmen.

DIREKTUR UTAMA

Memimpin kegiatan operasional perusahaan dan mengawasi orang-orang dibawahnya. Dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh beberapa orang direktur yaitu Direktur Korporasi, Direktur Ritel, Direktur Internasional, Direktur Tresuri,

Direktur Keuangan, dan Direktur Perencanaan yang keseluruhannya mempunyai tugas masing-masing dalam membantu Direktur Utama.

1. DIREKTUR KORPORASI

Direktur Korporasi memimpin beberapa divisi, antara lain :

- Divisi Korporasi
- Divisi Teknologi Informasi

2. DIREKTUR RITEL

Direktur Ritel memimpin beberapa divisi, antara lain :

- Divisi Pengelolaan Bisnis Kartu
- Divisi Pemasaran Ritel
- Unit-Unit Usaha Syariah
 - Cabang Syariah
- Divisi Pembinaan Bisnis Ritel dan Menengah
 - Kantor Wilayah
 - Cabang Dalam Negeri

3. DIREKTUR INTERNASIONAL

- Divisi Hubungan Investor dan Kesekretariatan
- Divisi Kredit Khusus
- Divisi Internasional
 - Cabang Luar Negeri

4. DIREKTUR TRESURI

- Divisi Investasi dan Jasa Keuangan
- Divisi Sumber Daya Manusia

- Bagian Akuntansi

5. DIREKTUR PENGENDALIAN RISIKO

- Divisi Pengendalian Risiko
- Divisi Pengendalian Keuangan
- Unit Pengelola Perusahaan Anak
 - Perusahaan Anak.

6. DIREKTUR KEPATUHAN

- Divisi Perencanaan Strategis
- Divisi Hukum
- Divisi Umum

7. SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI)

2.3 Deskripsi Jabatan

FUNGSI DAN TUGAS DIVISI/UNIT/SATUAN

1. DIVISI KORPORASI (KPI)

- Mengelola hubungan Bank BNI dengan nasabah korporasi.
- Membantu mengembangkan usaha calon nasabah.

2. DIVISI TEKNOLOGI INFORMASI (TEK)

- Menyiapkan sistem otomatis yang digunakan oleh Bank BNI.
- Memberikan dukungan kepada seluruh unit organisasi dalam melaksanakan otomasi yang ditetapkan direksi.

3. DIVISI PENGELOLAAN BISNIS KARTU (PBK)

- Menciptakan dan mengembangkan terhadap pengelolaan promosi dan advertasi dalam rangka pengembangan bisnis kartu kredit Bank BNI.
- Memelihara *soft ware* dan *hard ware* serta mengembangkan sistem jaringan komunikasi sesuai dengan kebutuhan.
- Memonitoring aktivitas penggunaan kartu kredit Bank BNI sebagai deteksi awal terhadap adanya kejahatan dan penyalahgunaan kartu kredit.
- Melakukan monitoring atas transaksi-transaksi kartu kredit Bank BNI.

4. DIVISI PEMASARAN RITEL (PMR)

- Mengembangkan produk/jasa/*feature* pelayanan perbankan baru yang ditargetkan kepada nasabah individu/nasabah usaha kecil.
- Mengelola peraturan dan prosedur aktivitas pemasaran, pelayanan operasional bisnis *retail banking*.
- Melaksanakan program promosi dan media promosi.
- Meneliti perkembangan permintaan dan kebutuhan pasar akan produk/jasa perbankan yang berkualitas.

5. UNIT-UNIT USAHA SYARIAH (UUS)

- Mengelola kegiatan cabang syariah Bank BNI.

6. DIVISI PEMBINAAN BISNIS RITEL DAN MENENGAH (PBE)

- Memproses, memantau dan membina perkembangan kredit menengah.
- Mengelola data informasi bisnis manajemen ritel.

7. DIVISI HUBUNGAN INVESTOR DAN KESEKRETARIATAN (HIS)

- Memantau, menganalisa perkembangan kinerja saham dan perusahaan.
- Mengelola kegiatan *Road Show*, Seminar, Jumpa Pers serta kegiatan yang berhubungan dengan kinerja perusahaan.
- Mengkoordinir penyusunan dan penerbitan *annual report*.
- Mengelola kegiatan protokol Direksi dan Komisaris.

8. DIVISI KREDIT KHUSUS (DKS)

- Mengelola kredit bermasalah sektor *wholesale*.
- Pemeliharaan dan Pengelolaan kearsipan dokumentasi nasabah.

9. DIVISI INTERNASIONAL (INT)

- Pengelolaan, pemasaran dan promosi dari jasa *international Banking*.
- Menyusun tarif transaksi luar negeri.
- Mengelola laporan cabang luar negeri.
- Menangani upaya pemalsuan dan penipuan untuk transaksi *international banking*.
- Berperan dalam pengembangan transaksi ekspor dan impor.
- Mengelola rekening *vostro koresponden*.

10. DIVISI INVESTASI DAN JASA KEUANGAN (IJK)

- Mengelola jasa pelayanan bank terpadu kepada nasabah individu.
- Mengelola jasa pelaksanaan DPLK Bank BNI.
- Mengelola kredit Sindikasi.
- Mengelola dan memasarkan jasa-jasa *Custody, Trustee, Sinking Funds, Paying Agent* dan Jasa Advisory Keuangan.

11. DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

- Mengelola kebijakan, struktur, komposisi, kuantitas, dan kualitas Bank BNI.
- Mengelola kebijakan *Training* dan *Developmet*.
- Mengelola dan mengembangkan sistem penggajian dan *reward*.
- Memelihara dan mengelola sistem informasi SDM (*hardware* dan *software*).
- Mengelola dan mengembangkan rencana dan strategi komunikasi pegawai.
- Mengelola, mengembangkan dan memantau pelaksanaan budaya kerja.
- Mengelola pelayanan fasilitas kesejahteraan dan kesehatan pegawai.
- ❖ Bagian Akuntansi
 - Mengukur biaya dan nilai manusia yang dikontribusikan kepada perusahaan.
 - Untuk memberikan informasi pada divisi SDM agar dapat secara efektif memonitor dan memantau perusahaan.
 - Memberikan indikator dalam pengawasan aktiva.
 - Membantu pengembangan prinsip manajemen dengan menjelaskan akibat keuangan dari berbagai praktek.
 - Untuk bisa memenangkan strategi persaingan yang semakin tajam.

- Untuk melengkapi nilai tentang SDM yang selanjutnya digunakan dalam proses pengambilan keputusan agar tercapai efektifitas tujuan organisasi.

12. DIVISI PENGENDALIAN RISIKO (PAR)

- Mengelola risiko investasi.
- Memastikan produk dan jasa BNI beserta pengembangannya sesuai dengan persaingan bisnis dan kondisi pasar.

13. DIVISI PENGENDALIAN KEUANGAN (PKU)

- Mengelola pengadaan peralatan teknologi informasi.
- Merekonsiliasi rekening.
- Menyusun neraca, R/L gabungan dan laporan keuangan yang diwajibkan.

14. UNIT PENGELOLAAN PERUSAHAAN ANAK (UPPA)

- Menyusun perencanaan pengembangan usaha/bisnis/investasi (diversifikasi dan intensifikasi) sejalan dengan kebijakan Bank BNI.
- Merumuskan arah pengembangan bisnis dan sistem manajemen perusahaan anak.

15. DIVISI PERENCANAAN STRATEGIS (REN)

- Mengelola penyediaan bahan informasi dan dokumentasi untuk menunjang penyusunan kebijakan dan sistem manajemen Bank BNI.
- Mengelola pembuatan analisa statistik baik yang bersifat rutin maupun khusus.

- Mengelola kajian prospek pengembangan usaha dan bisnis Bank BNI menetapkan kebijakan dan sistem akuntansi.

16. DIVISI HUKUM (HUK)

- Menyusun dan menangani prosedur penanganan perkara perdata/pidana, tata usaha negara, klaim dan kepailitan serta penyelesaian kredit bermasalah.
- Melakukan penyelidikan kasus.
- Memberikan pelayanan konsultasi hukum kepada segenap organisasi Bank BNI mengenai kebijakan, kebiasaan dan praktek hukum yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank BNI.
- Melaksanakan pengamanan fisik di Kantor Besar.

17. DIVISI UMUM (UMM)

- Mengelola kebutuhan pengadaan barang sesuai arah pengembangan bisnis.
- Mengelola kualitas asset dan property lainnya dan mengevaluasi pemanfaatannya.
- Menunjang aktivitas protokoler Kantor Besar.

18. SATUAN PENGAWAS INTERN (SPI)

- Melaksanakan audit pada kantor cabang luar negeri, dalam negeri, Divisi/Unit/Satuan/Perusahaan Anak.
- Mengkaji dan mengembangkan sistem pemeriksaan intern.

2.4 Aspek Kegiatan Perusahaan

Berdasarkan UU No.7 Pasal 1 tahun 1992 memutuskan bahwa PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank Umum mempunyai usaha sebagai berikut :

1. Penghimpunan Dana

a. Giro

Adalah simpanan uang pada bank yang penarikannya dapat dilakukan di setiap saat selama dananya mencukupi dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran atau pemindah bukuan atau alat penarikan lainnya.

b. Deposito Berjangka

Adalah simpanan uang pada bank yang dapat ditarik kembali pada waktu tertentu (saat jatuh tempo) sesuai perjanjian yang disepakati bersama. Deposito berjangka yang tersedia pada Bank BNI adalah yang berjangka waktu :

- 1) 1 bulan
- 2) 3 bulan
- 3) 6 bulan
- 4) 12 bulan
- 5) 24 bulan

c. Sertifikat Deposito

Adalah sertifikat deposito yang diterbitkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dibuat atas unjuk dan dapat dipindah tangankan.

d. Tabungan Amanah

Adalah tabungan khusus diperuntukan bagi Umat Islam yang berniat menunaikan ibadah haji.

e. Dollar Plus

Adalah suatu jenis tabungan yang disediakan Bank BNI dengan menggunakan valuta asing yaitu Dollar.

f. Tabungan Plus (*Taplus*)

Adalah bentuk simpanan uang yang sangat cocok digunakan sebagai tabungan pribadi atau keluarga yang menguntungkan dan bermanfaat untuk menghadapi keperluan rutin yang mendadak.

g. Kartu Mahasiswa

Adalah tabungan khusus untuk mahasiswa yang dapat berguna sebagai kartu mahasiswa dan juga sebagai kartu tabungan.

2. Produk Jasa

a. Jasa Dalam Negeri, terdiri dari :

1) Kiriman Uang Dalam Negeri

Adalah suatu jasa bank dalam pengiriman uang antar bank atas permintaan pihak ketiga (perorangan atau perusahaan) yang ditunjuk kepada penerima perorangan atau perusahaan ditempat lain.

2) Delegasi Kredit

Adalah perintah tertulis kepada bank untuk membayar sejumlah uang secara berkala kepada seseorang atau suatu badan dalam jumlah dan jangka waktu tertentu.

3) Inkasso

Adalah jasa dari bank untuk menagihkan pembayaran atau suatu surat atau dokumen berharga kepada ketiga di tempat lain dimana PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk mempunyai cabang.

4) Jaminan Bank (*Rupiah*)

Adalah pernyataan tertulis dari bank yang menyatakan kesanggupan bank untuk membayar kepada pihak ketiga demi kepentingan nasabah jika nasabah bank tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban atau melakukan wan prestasi atas transaksi atau pembayaran yang diperjanjikan.

5) Surat Keterangan Bank

Adalah surat keterangan tertulis dari bank untuk pihak lain mengenai seorang nasabah atau badan hukum dalam hubungannya dengan bank, untuk memenuhi persyaratan dalam menjalankan usaha atau bisnis dengan pihak lain.

6) *Safe Deposit Box*

Adalah suatu jasa bank dalam penyimpanan barang-barang dan surat-surat berharga.

7) Simpanan Terbuka atau Tertutup

Adalah suatu jasa bank yang diberikan kepada nasabah (penyewa) untuk menyimpan barang atau dokumen berharga selama jangka waktu tertentu dengan membebani sewa yang disepakati bersama.

8) *Letter Of Credit* Dalam Negeri

Adalah suatu jaminan masyarakat dari bank pembuka L/C untuk membayar wesel-wesel yang tertarik oleh *beneficiary*.

9) *Draft*

Adalah surat perintah bayar tidak bersyarat yang diterbitkan oleh bank korespondennya untuk dibayarkan kepada seseorang atau pengusaha atau ordernya.

10) *Collection*

Adalah tagihan untuk membayar atau mengakses dari seseorang atau perusahaan di luar negeri kepada seseorang atau perusahaan lain di dalam negeri atau sebaliknya atas suatu surat atau dokumen berharga melalui bank.

11) Garansi Bank

Adalah suatu jaminan yang diberikan bank yang menyatakan bahwa pihak bank memberikan jaminan untuk memenuhi kewajiban (sebesar jumlah pokok garansi yang dikeluarkan) apabila pihak yang dijamin di kemudian hari ternyata tidak atau gagal memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai apa yang diperjanjikan.

12) *Traveller Checks (TC)*

Adalah cek untuk berpergian, sangat baik dan aman untuk dibawa berpergian ke luar negeri, jika hilang pemegang dapat meminta pengantinya.

13) Transaksi Ekspor

Adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

b. Jasa Luar Negeri, terdiri dari :

1) *Foreign Exchange (Forex)*

Adalah suatu tempat atau abstrak dimana dapat diperlakukan pertukaran atau jual-beli antara suatu currency dengan currency lainnya yang mengakibatkan beralihnya hak milik atas currency yang diperjual belikan tersebut.

2) Pasar Modal

Adalah bursa yang merupakan sarana untuk mempertemukan penawar dengan peminta dana jangka panjang dalam bentuk efek.

3) *Layanan Custody (Custody Market)*

Adalah layanan terpadu atas kegiatan transaksi efek nasabah yang meliputi :

- a) *Layanan penyimpanan (Safe Keeping Service)*
- b) *Layanan transaksi (Trade Clearance)*
- c) *Layanan informasi (Information)*

4) Layanan Broker (*Broker Service*)

Adalah layanan jasa kepada nasabah untuk melakukan jual-beli saham, obligasi, sertifikat dana reksa dan surat berharga lainnya di Bursa Efek Jakarta (BEJ), Bursa Paralel (Jakarta), dan Bursa Efek Surabaya (BES).

5) Amex PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk *Gold Card*

Adalah Kartu kredit *American Express* yang dikeluarkan oleh Amexco dengan jasa-jasa yang dapat diberikan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

3. Produk Kredit

a. Kredit Modal Kerja.

Adalah Kredit untuk keperluan membiayai modal kerja perusahaan seperti pembelian bahan baku, persediaan barang, piutang dagang dan keperluan dagang lainnya.

b. Kredit Investasi.

Adalah Kredit untuk membiayai barang, seperti pembelian tanah, mesin, peralatan lainnya pembangunan pabrik atau kantor.

c. *Kredit Off Share*

Adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur dalam negeri dalam bentuk valuta asing yang dilaksanakan melalui cabang PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk di luar negeri.

d. *Kredit Cash Collateral*

Adalah kredit khusus yang diberikan kepada deposito berjangka PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, bank pemerintah lainnya atau

bank asing atau bank nasional yang bonafide atau pemegang Taplus PT.
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

e. Kredit Profesi

Adalah kredit untuk membantu para professional seperti dokter, insinyur, notaris dan sebagainya dalam mengembangkan usaha profesinya.

f. Kredit konsumsi

Adalah fasilitas kredit untuk keperluan pembelian barang-barang konsumsi yang diperlukan oleh para debitur.

4. Layanan

a. *Phone Plus*

Adalah suatu layanan yang diberikan Bank BNI melalui telepon untuk mempermudah segala jenis transaksi yang dibutuhkan nasabah.

b. *Automatic Teller Machine (ATM)*

Adalah sistem layanan bank secara elektronik dengan menggunakan komputer untuk mengupayakan penyelesaian fungsi-fungsi secara otomatis dari sebagian fungsi yang biasa dilakukan oleh Teller.

c. Layanan Purna

Adalah suatu layanan yang dilakukan oleh Bank BNI setelah dilakukannya suatu transaksi.

d. Ongkos Naik Haji

Adalah suatu layanan yang diberikan oleh Bank BNI dalam menerima pembayaran ongkos atau biaya yang diperlukan oleh Umat Islam dalam menunaikan ibadah haji.